



**DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Laporan Kinerja 2023

Perencanaan & Pelaporan



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas perkenaan-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah dapat diselesaikan dengan baik.

LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah tahun 2023 merupakan iktisar akuntabilitas yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah tahun 2023 atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2023 dan ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah.

Tidak lupa ucapan terima kasi kami haturkan kepada seluruh pegawai dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah dan semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LKjIP tahun 2023 ini. Harapan kami semoga dokumen LKjIP tahun 2023 dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, dan LKjIP tahun 2023 ini juga dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam rangka penyempurnaan dokumen perencanaan dan meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah pada tahun yang akan datang

Menyadari akan kelemahan dan kekurangan atas muatan dokumen LKjIP ini, oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan untuk kesempurnaannya.

Masohi, Pebruari 2024

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MALUKU TENGAH



Drs. HENGKY TOMASOA, MA

NIP. 19691028 198902 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksklusif.....	ii
Daftar isi	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.3. Tatalaksana Organisasi.....	4
1.4. Maksud dan Tujuan.....	10
1.5. Permasalahan.....	11
1.6. Isu Strategi.....	13
1.7. Landasan Hukum	14
1.8. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	21
3.2. Capaian Kinerja Anggaran.....	30
BAB IV PENUTUP.....	39
4.1. Simpulan Umum.....	39
4.2. Strategi Peningkatan Kinerja.....	40



**Tim Penyusun Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023**

Pengarah

Drs. HENGKY TOMASOA, MA. Kepala Dinas

Penanggung Jawab

Fungsional Perencanaan dan Pelaporan

Anggota

Kata Pengantar

Perkembangan Teknologi Informasi mendorong Pembangunan Kabupaten Maluku Tengah Semakin Maju, Sejahtera Dan Berkelanjutan

Pembangunan Kabupaten Maluku Tengah terus mengalami peningkatan terutama pada aktivitas layanan. Dinamika dari era digital ini juga telah menyebabkan terjadinya cara baru yang memanfaatkan perubahan teknologi komunikasi dan informasi. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan transformasi dalam memberikan layanan publik yang lebih baik kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi.

Dalam rangka memperkuat ekonomi daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika fokus pada reformasi kebijakan di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), terutama yang terkait dengan DNA (Device / perangkat, Network / jaringan, Application / aplikasi). Hasil capaian pelaksanaan program-program tersebut, disampaikan dalam Laporan Kinerja (LKj) Kemkominfo.

Selain membuat kebijakan sektor TIK, Dinkominfo juga melaksanakan fungsi edukasi dalam melaksanakan program kebijakan untuk pengelolaan media informasi di daerah. Selain itu, juga berperan sebagai Government Public Relations dalam mendiseminasikan program-program pemerintah daerah dengan menyajikan informasi resmi dan akurat dari lintas sektor pemerintah sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami program-program pemerintah tersebut beserta hasil-hasilnya.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Dinkominfo Tahun 2023 ini, diharapkan dapat menjadi perwujudan dari upaya Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjaga akuntabilitas kinerja dan menjadi media komunikasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi terkait kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Melalui laporan kinerja ini pula, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi peningkatan kinerja di lingkungan internal Dinkominfo.

Masohi, Pebruari 2024

Kepala Dinas,



Drs. HENGKY TOMASOA, MA.

NIP. 19691028 198902 1 002

Ringkasan Eksekutif

Untuk membantu Bupati Maluku Tengah dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika serta Bidang Persandian

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung mewujudkan Kabupaten Maluku Tengah sebagai Jendela Indonesia Bagian Timur dengan berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan sasaran strategis yang ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Diskominfo Tahun 2023 yang merupakan implementasi dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam menjawab Tujuan dan Sasaran Pembangunan Bupati Maluku Tengah sebagaimana di Amanatkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Maluku Tengah 2023-2026. Laporan Kinerja Diskominfo Tahun 2023 disusun untuk menyajikan informasi tentang capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang diperjanjikan Dinas Komunikasi dan Informatika kepada para pimpinan dan stakeholders selama Tahun 2023. Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah serta berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023–2026 serta dokumen perencanaan turunannya.

Perjanjian Kinerja ini ditetapkan kedalam 2 (dua) Tujuan dengan 2 (dua) Indikator Tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja Sasaran. Ikhtisar hasil evaluasi capaian kinerja tersebut diuraikan pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1. Ikhtisar Capaian Kinerja Dinas Kominfo Tahun 2023

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Real	% Real	Capaian Tahun Sebelumnya	Analisis dan Evaluasi
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	Tujuan 1 : Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Komunikasi, Informasi, dan Persandian	Cakupan Infrastruktur dan Layanan Publik yang terintegrasi	%	58.00	50.00	86.21	96,15	Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 58.00% dan Realisasinya mencapai 43,26% atau sebesar 74,59% dengan implementasi BAIK
2	Sasaran 1 : Meningkatnya kapabilitas bidang Komunikasi, Informasi Persandian dan Pelayanan Publik	Persentase tersedianya Pemenuhan Jaringan Daerah	%	22.86	22.86	100.00	98.25	Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 22,86% dan Realisasinya mencapai 17,14% atau sebesar 74,98 % dengan Interpretasi BAIK
		Capaian Predikat Indeks SPBE	%	1,54	1.15	74.68	0	Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 1.54% dan Realisasinya mencapai 1.15% atau sebesar 74,68% dengan Interpretasi KURANG
		Persentase Desa Terakses Jaringan Telekomunikasi	%	85.00	86.98	102.33	78.46	Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 85,00% dan Realisasinya mencapai 61,54% atau sebesar 72,40% dengan Interpretasi BAIK
		Persentase Keterbukaan Informasi Publik	%	25.00	25.00	100.00	100	Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 25,00% dan Realisasinya mencapai 25,00% atau sebesar 100 % dengan Interpretasi MEMUASKAN
		Indekx Keamanan Komunikasi dan Informasi		100	88.89	88.89	97.99	Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100% dan Realisasinya mencapai 88,89% atau sebesar 88,89% dengan Interpretasi SANGAT BAIK, dan perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
3	Tujuan 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Predikat LAKIP	Nilai	B (70)	B (70)	100	92.32	Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2023 ditargetkan sebesar A dan Realisasinya mencapai BB atau sebesar 89,41% dengan Interpretasi SANGAT BAIK
4	Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100% dan Realisasinya mencapai 100% atau sebesar 100% dengan Interpretasi MEMUASKAN

Kinerja Anggaran Tahun 2023

Realisasi Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 5.601.748.527,- atau 94,23% dari Pagu DPA sebesar Rp. 5.944.897.613,- Dengan rincian Realisasi Belanja Langsung sebesar 2,573,517,900,- atau 95,80% dari pagu Rp. 2,686,309,113,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.028.230.627,- atau 92,93% dari pagu anggaran Rp. 3.258.588.500,-.

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut;

KODE	URAIAN BELANJA	2023			2022
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
5.1	BELANJA OPERASIONAL	5,732,638,613	5,539,489,527	96.63	4,968,489,829
5.1.01	Belanja Pegawai	2,686,309,113	2,573,517,900	95.80	2,343,898,643
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3,046,329,500	2,965,971,627	97.36	2,624,591,186
5.2.	Belanja Modal	212,259,000	62,259,000	29.33	532,294,400
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	212,259,000	62,259,000	29.33	532,294,400
		5,944,897,613	5,601,748,527	94.23	5,500,784,229

BAB I

Pendahuluan

Program dan kegiatan pembangunan di Bidang Komunikasi dan Informatika serta Bidang Persandian berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Kepala Daerah dengan Eselon II dan Eselon III secara berjenjang

1. Latar Belakang.

Dalam rangka terwujudnya good governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Setiap organisasi publik saat ini diharapkan lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Berkaitan dengan aspek pengelolaan kinerja instansi, telah dibangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksana kebijakan dan program berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Di dalam SAKIP terdapat komponen-komponen yang harus dipenuhi antara lain proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja, penetapan kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerjanya.

SAKIP dikembangkan secara integrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan dan sistem akuntabilitas pemerintahan. Substansi dari SAKIP pada intinya adalah penyelarasan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan orientasi kepada hasil. Proses penyelarasan ini dilakukan melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan dan penetapan Kinerja. Renstra memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah, sedangkan rencana kinerja tahunan dan penetapan

kinerja merupakan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu. Rencana kinerja merupakan penjabaran dari renstra, memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan. Selanjutnya, rencana kerja disusun sesuai dengan ketersediaan alokasi anggaran, yang dituangkan dalam suatu penetapan kinerja. Penetapan kinerja akan dipertanggungjawabkan capaian kerjanya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

2. Gambaran Umum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu rencana strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Laporan kinerja ini mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023 merupakan ikhtisar pertanggungjawaban yang memuat secara lengkap tentang pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023. LKjIP ini menjelaskan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah merupakan salah satu unsur pelaksana urusan pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Maluku Tengah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah, yang mempunyai tugas pokok sebagai penyelenggara kewenangan/melaksanakan urusan pemerintahan daerah meliputi urusan bidang komunikasi dan informatika, urusan bidang persandian. Pengaturan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Tugas pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah, bahwa dinas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika;
- b) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Komunikasi dan Informatika;
- d) Pelaksanaan administrasi Bidang Komunikasi dan Informatika;

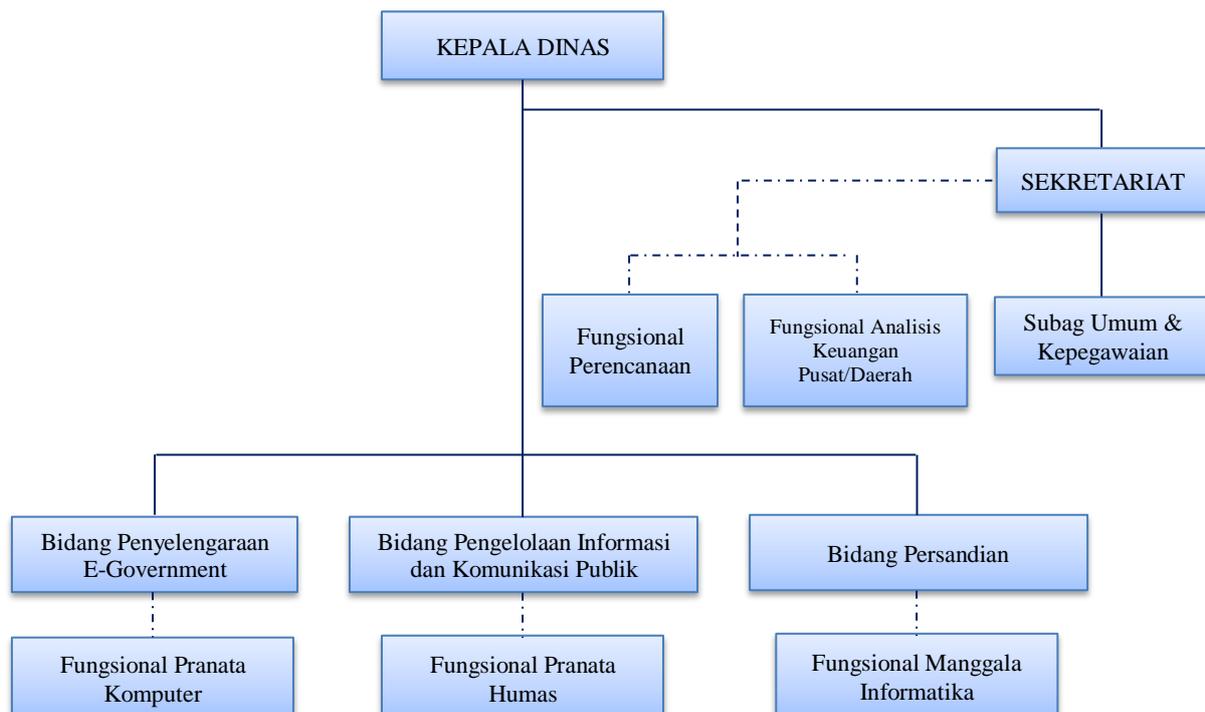
e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun susunan organisasinya Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut atas :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional Perencana dan Analisi Keuangan
- 3) Bidang Pengolahan Informasi dan Komunkasi Publik terdiri atas :
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Humas
- 4) Bidang Penyelenggaraan E-Goverment terdiri dari :
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer
- 5) Bidang Persandian membawahi:
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional Manggala Informatika

Adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah Tengah yang mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah, diperlihatkan dalam bagan beriku ini:

Bagan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Dinas Komunikasidan Informasi Kabupaten Maluku Tengah



Tugas yang dibebankan kepada unsur organisasi adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas di bidang komunikasi dan informatika dengan mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang Komunikasi dan Informatika agar dapat berjalan optimal;
- b) Sekretariats mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan teknis administrasi untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi menghimpun, mengkoordinasikan, memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas dengan merencanakan, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan optimal;
- c) Bidang Pengolahan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas di Bidang Pengolahan Informasi dan Komunikasi Publik dan Hubungan Media dan melaksanakan fungsi dengan menghimpun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, menyiapkan, membagi tugas, memberikan dan melaporkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan optimal dan tepat waktu;
- d) Bidang Penyelenggaraan E-Government mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas di Bidang Penyelenggaraan E-Government dengan menghimpun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, menyiapkan, melaksanakan, membagi tugas, memberikan dan melaporkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan optimal dan tepat waktu;
- e) Bidang Persandian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas di Bidang Tata Kelola dan Operasional Pengamanan Persandian dan Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Persandian dengan menghimpun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, menyiapkan, melaksanakan, membagi tugas, memberikan, melaporkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan optimal dan tepat waktu

3. Tata Laksana Dinas Komunikasi Dan Informatika

A. Prinsip Tata Laksana

Tata laksana Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada delapan karakter dasar dalam mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik, yaitu:

- a) Partisipasi Aktif dalam merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugas dinas

dalam rangka menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika;

- b) Penegakan hukum, memberi sanksi bagi yang melanggar hukum;
- c) Transparansi, terbuka informasi bagi yang memerlukan kecuali yang sifatnya rahasia negara;
- d) Responsif dalam menjawab tuntutan untuk perbaikan;
- e) Berorientasi pada musyawarah untuk mufakat dalam merencanakan kegiatan, dan menyelesaikan permasalahan yang timbul;
- f) Keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang dalam melayani;
- g) Efektif dan ekonomis dalam mengelola sumber daya;
- h) Akuntabilitas Melaksanakan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pada target yang ditetapkan.

B. Tata Kerja

- a) Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup dinas maupun dengan perangkat daerah terkait lainnya serta dengan semua unsur di lingkungan pemerintah daerah;
- b) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
- d) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi dinas serta menjabarkannya dalam program dan kegiatan operasional sesuai tugas dan fungsi serta bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu waktu;
- e) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan masing-masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk dan atau arahan kepada bawahan;
- f) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Bupati;

- g) Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan Kepala Dinas dapat disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

C. Prosedur Kerja Dinas: Kepala Dinas

Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati untuk menyelenggarakan kebijakan teknis urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang komunikasi dan informatika.

Sekretaris

Sekretaris bertanggung jawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan penyusunan program Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada sekretaris untuk penyusunan rencana kegiatan pengelolaan, administrasi umum, pengelolaan administrasi kepegawaian, evaluasi dan pelaporan pelaksana kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Fungsional Perencanaan dan Pelaporan

Fungsional Perencanaan dan Pelaporan bertanggung jawab kepada sekretaris untuk penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan program, penyusunan bahan pembinaan sistem informasi manajemen, penyusunan rencana strategis, dan pengumpulan bahan pengusulan program, bahan pembinaan sistem pengelolaan informasi, bahan pengelolaan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan pelaksana kegiatan lingkup penyusunan rencana dan program dinas serta penyusunan rencana kegiatan, penyiapan bahan lingkup perbendaharaan dan perlengkapan.

Fungsional Analisi Keuangan Pusat/Daerah

Fungsional Analisi Keuangan Pusat/Daerah bertanggung jawab kepada sekretaris untuk penyusunan pengelolaan administrasi keuangan, sistem akuntansi keuangan, penyusunan laporan keuangan, penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan, evaluasi dan pelaporan pelaksana kegiatan keuangan dan perlengkapan.

Bidang Pengolahan Informasi dan Komunkasi Publik

Kepala Bidang Pengolahan Informasi dan Komunkasi Publik bertanggungjawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan pembinaan Kelembagaan Usaha Pengolahan Informasi dan Komunkasi Publik, meliputi : penyusunan program dan kegiatan bidang, penyiapan bahan kebijakan umum bidang prasarana dan sarana penghubung, potensi dan permasalahan prasarana dan sarana, rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang, pembinaan teknis operasional, pelayanan umum informasi bidang prasarana dan sarana, evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang.

Fungsional Pranata Humas.

Fungsional Pranata Humas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang untuk pelaksanaan :

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik meliputi : penyusunan rencana kegiatan, penyiapan bahan kebijakan umum Kelembagaan Usaha Pengolahan Informasi dan Komunikasi Publik, penyiapan bahan teknis operasional, penyiapan bahan pembinaan teknis, penyiapan bahan laporan dan evaluasi seksi Pengolahan Informasi dan Komunkasi Publik, melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi.
2. Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media, meliputi : penyusunan program dan kegiatan seksi, penyiapan bahan kebijakan umum bidang Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media, menyusun potensi dan permasalahan lingkup seksi, kebijakan teknis, rencana dan pelaksanaan kegiatan seksi, pembinaan teknis operasional, pelayanan umum informasi bidang komunikasi dan informatika, evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang.

Bidang Penyelenggaraan E-Government

Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government bertanggungjawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan pembinaan Kelembagaan usaha Penyelenggaraan E-Government, meliputi : penyusunan program dan kegiatan bidang, penyiapan bahan kebijakan umum bidang Penyelenggaraan E-Government, potensi dan permasalahan bidang, kebijakan teknis, rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang, pembinaan teknis operasional, pelayanan umum informasi kepada masyarakat, evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang.

Fungsional Pranata Komputer

Fungsional Pranata Komputer kepada Kepala Bidang untuk pelaksanaan :

1. Infrastruktur dan Teknologi, meliputi: penyusunan rencana kegiatan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberi bimbingan teknis dan supervise di bidang Infrastruktur dan Teknologi, penyiapan bahan teknis operasional, penyiapan bahan pembinaan teknis, penyiapan bahan laporan dan evaluasi seksi Infrastruktur dan Teknologi, melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi.
2. Layanan E-Government meliputi : penyusunan rencana kegiatan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberi bimbingan teknis dan supervise di bidang Layanan E-Government, penyiapan bahan teknis operasional, penyiapan bahan pembinaan teknis, penyiapan bahan laporan dan evaluasi seksi Layanan E-Government, melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi.

Bidang Persandian

Kepala Bidang Persandian bertanggungjawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan pembinaan Kelembagaan usaha Penyelenggaraan Persandian, meliputi : penyusunan program dan kegiatan bidang, penyiapan bahan kebijakan umum bidang Persandian, potensi dan permasalahan bidang, kebijakan teknis, rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang, pembinaan teknis operasional, pelayanan umum informasi kepada masyarakat, evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang.

Fungsional Manggala Komputer

Fungsional Manggala Komputer bertanggung jawab kepada Kepala Bidang untuk pelaksanaan

1. Tata Kelola dan Operasional Pengamanan Persandian, meliputi : penyusunan rencana kegiatan, pengolahan proses pengamanan informasi milik daerah, pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan, dan penghacuran informasi berkalsifikasi, melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi.
2. Pengawasan dan Evaluasi Penyelnggaran Persandian, meliputi: penyusunan rencana kegiatan, penyiapan instrument, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi

Dengan demikian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dibebankan pada 6 jabatan struktural. Secara rinci distribusi jabatan struktural adalah sebagai berikut : Eselon II/b = 1 jabatan, Eselon III/a = 1 jabatan, Eselon III/b = 3 jabatan, Eselon IV/a = 1 jabatan. Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 50 personil dengan rincian 6 orang adalah pejabat structural, 5 orang pejabat fungsional dan sisanya sejumlah 18 orang staf serta pegawai Honorer sebanyak 21 orang. Jika melihat kuantitas SDM yang tersedia sampai dengan akhir Desember 2023, sangat dibutuhkan tenaga teknis, Operator Komputer serta tenaga IT.

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di perangkat daerah dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah sarjana (S2) sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 27 orang, Diploma sebanyak 4 orang dan SMA sebanyak 16 orang.

Kondisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan sampai saat ini belum ada tenaga di bidang IT, oleh karena itu sangatlah dibutuhkan sarjana teknis dibidang tersebut. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan jumlah pegawai berdasarkan golongan sebagai berikut : golongan II/a = - orang, II/b = - orang , II/c = 3 orang, golongan II/d = 5 orang, golongan III/a = 2 orang , III/b = 6 orang, III/c = 3 orang, III/d = 5 orang, Golongan IV/a = 3 orang, Golongan IV/b = 2 orang.

4. Maksud & Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Bupati Maluku Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan selama Tahun 2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini adalah untuk melakukan penilaian dan evaluasi atas pencapaian kinerja dan sasaran pembangunan di bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian selama Tahun 2023, sekaligus sebagai alat kendali dan pemicu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Maluku Tengah. Strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika yakni berikut :

1. Pengembangan layanan dan pemanfaatan TIK untuk meningkatkan kualitas layanan informasi yang bisa diakses secara cepat, aman dan tepat. Strategi ini dilaksanakan dengan arah kebijakannya sebagai berikut :
 - Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi;
 - Peningkatan kapasitas aksesibilitas (bandwidth);
 - Pengintegrasian aplikasi informatika;
 - Penyediaan server basis data dan aplikasi;
 - Penyediaan dan pengembangan aplikasi layanan publik baik yang berbasis web maupun mobile; dan
 - Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM aparatur di bidang komunikasi dan informatika.
2. Peningkatan layanan informasi dan komunikasi publik. Strategi ini dilaksanakan dengan arah kebijakannya sebagai berikut :
 - Peningkatan akses layanan informasi dan komunikasi publik yang profesional
3. Penyediaan data statistik sektoral sekaligus menjamin tingkat keakuratan data sektoral. Strategi ini dilaksanakan dengan arah kebijakannya sebagai berikut :
 - Implementasi Satu Data Kabupaten Maluku Tengah
 - Peningkatan diseminasi data statistik sektoral yang termutakhirkan
4. Penguatan kebijakan implementasi tata kelola keamanan informasi pemerintah daerah. Strategi ini dilaksanakan dengan arah kebijakannya sebagai berikut :
 - Penyusunan peraturan daerah dalam bentuk Perda dan Perbup tentang tata kelola keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten.
 - Penataan dan penguatan kelembagaan organisasi pelaksana urusan persandian

5. Pengembangan dan penerapan teknologi keamanan dan sarana pendukung keamanan informasi. Strategi ini dilaksanakan dengan arah kebijakannya sebagai berikut :
 - Pengadaan, pemeliharaan dan pengembangan teknologi keamanan informasi dan sarana untuk mendukung penyelenggaraan keamanan informasi pemerintah daerah

5. Permasalahan

Sesuai uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Dinas Kominfo antara lain :

1. Masih adanya kesenjangan digital di beberapa wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Kesenjangan digital selalu disebabkan karena adanya ketimpangan dan ketidakseimbangan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kesenjangan digital ini menyebabkan terbatasnya akses masyarakat di beberapa wilayah terhadap informasi dan komunikasi. Permasalahan kesenjangan digital di wilayah Kabupaten Maluku Tengah banyak dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi. Luas wilayah dan kondisi geografis Kabupaten Maluku Tengah yang berbentuk kepulauan dan pegunungan, penyebaran penduduk yang tidak merata, serta penggunaan satelit yang kurang optimal juga menyebabkan jangkauan komunikasi dan penyebaran informasi menjadi tidak merata. Penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika yang hampir seluruhnya mengandalkan peran dunia usaha juga menyebabkan adanya blank spot di wilayah non-komersial seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Seram Utara, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kecamatan Leihitu Barat, Kecamatan Banda, Kecamatan Nusalaut, Kecamatan Telutih, Kecamatan Tehoru, Kecamatan Pulau Haruku, Kecamatan TNS, Kecamatan Saparua dan Kecamatan Amahai. Kendala serius yang juga dihadapi pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk mengatasi kesenjangan digital terletak pada cara pandang masyarakat mengenai pemanfaatan TIK, sehingga pemerintah perlu meyakinkan dan melatih masyarakat bahwa penggunaan TIK mampu meningkatkan produktivitas, lapangan kerja, dan ketersediaan informasi yang cepat serta mudah digunakan di berbagai aspek bidang kehidupan.
2. Kebutuhan akses internet untuk Desa berdasarkan data statistik 2023, Kabupaten Maluku Tengah memiliki 183 Desa dan 6 Kelurahan. Dari jumlah tersebut sebanyak 22.04% desa di Kabupaten Maluku Tengah masih mengalami Blank Spot sehingga memerlukan ketersediaan akses internet dan pemberdayaan TIK melalui e-literasi.

Desa membutuhkan penyediaan, penguatan, dan peningkatan akses internet untuk penyebaran informasi publik. Tersedianya akses internet dalam kaitannya dengan desa dapat memudahkan masyarakat untuk mencari informasi di semua bidang sehingga dapat mengurangi keterlambatan informasi.

3. Belum Terintegrasinya Database dan Layanan e-Gov Perangkat Daerah E-Government (electronic government) adalah suatu pemanfaatan teknologi informasi, baik internet maupun non-internet, untuk menyediakan pelayanan yang lebih nyaman dan efisien terhadap warga dan organisasi atas informasi dan pelayanan pemerintah yang berbasis internet, seperti portal, website, email, blog, dan lain-lain. Konsep yang diusung ini sebenarnya cukup baik, namun belum terintegrasinya database dan layanan e-government antara instansi pemerintah pusat dan daerah menjadi kendala dalam penerapan layanan e-government secara nasional. Selain itu, terbatasnya SDM bidang TIK dan keterbatasan anggaran menyebabkan kurang optimalnya penerapan, pelayanan dan pengelolaan e-government perangkat daerah di Kabupaten Maluku Tengah. Secara eksternal, hal ini dipengaruhi juga oleh belum optimalnya pemuktahiran (update) database dari perangkat daerah dan belum optimalnya sosialisasi penerapan aplikasi informatika pada perangkat daerah.
4. Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Belum termanfaatkannya Kelompok informasi Masyarakat (KIM) sebagai media penyampaian informasi bagi masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam penyebarluasan kebijakan pemerintah seperti Kelompencapir pada masa orde baru sangat efisien. Sesuai perkembangan jaman, model kelompencapir bermetamorfosis menjadi KIM. Adanya kelompok ini dapat mengintensifkan tersampainya informasi kepada masyarakat. Selain KIM saat ini juga terdapat telecenter yang menjadi wadah bagi kelompok masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyebarluaskan informasi baik secara vertikal maupun horizontal
5. Maraknya Hoaks, Konten Ilegal, Berbahaya, dan Malware, maraknya konten hoaks, konten pornografi, judi, kekerasan, SARA, malware dan konten ilegal lainnya telah memicu banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, kerusuhan antar desa, meningkatnya kejahatan, serta pengaruh buruk bagi masyarakat terutama anak-anak. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah harus hadir dalam upaya penanganan konten ilegal tersebut dengan menetapkan Peraturan Menteri tentang DNS Nasional.
6. Perubahan paradigma dan kewenangan urusan persandian Transformasi fungsi persandian yang awalnya pengamanan informasi rahasia, menjadi kegiatan untuk mengamankan data, informasi dan aset informasi secara keseluruhan.

7. Diseminasi Data Statistik Sektoral yang belum optimal. Pada prinsipnya belum optimalnya penyelenggaraan diseminasi data statistik sektoral oleh Dinas Kominfo dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya aparatur di bidang statistik, belum terkoordinasinya pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral dengan perangkat-perangkat daerah yang terkait dan belum adanya regulasi daerah untuk mendukung penyelenggaraan survei data maupun kompilasi produk administrasi data statistik sektoral di Kabupaten Maluku Tengah.
8. Sarana dan Prasarana Aparatur, masih terbatasnya sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas seperti belum tersedianya ruang server, Media Center, dan perlengkapan kerja pegawai yang representatif dan memadai.

6. Isu Strategis

Isu-Isu Strategis yang akan dihadapi antara lain:

1. Satu Data untuk Pembangunan Kabupaten

Untuk mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya, maka penentuan arah dan sasaran pembangunan daerah harus dilandasi oleh data dan informasi yang akurat. Untuk itu pengelolaan data dan informasi daerah harus difasilitasi secara terpadu dan terintegrasi dengan berbasiskan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Layanan Pemerintah Daerah harus berbasis elektronik dengan system aplikasi (misalnya: perijinan, pendapatan daerah, pengiriman Jasa surat menyurat dll) secara bertahap akan dilayani berbasis TIK.

3. Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya.

4. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), khususnya teknologi informasi yang pesat perlu direspon dan diantisipasi dengan berbagai program dan kegiatan yang bisa dimanfaatkan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat yang melanda berbagai wilayah dan komunitas masyarakat, termasuk juga kebutuhan masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Bila tidak diantisipasi secepatnya tentu akan membawa ekses yang kurang baik bagi masyarakat.

7. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2022 -2026;
7. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah.

8. Sistematika Penyusunan.

Sistematika Penyusunan LKjIP Dinas Kominfo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN, yang menjelaskan latar belakang, gambaran umum, tata laksana dinas, maksud dan tujuan, permasalahan, isu strategis, landasan hukum dan sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA, yang menguraikan tentang ringkasan atau ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, yang memaparkan tentang Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas Kominfo pada tahun 2023.

BAB IV PENUTUP, yang menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Kominfo, rencana tindak lanjut dan komitmen yang akan dilakukan Dinas Kominfo untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Semakin Maju Sejahtera dan Berkelanjutan

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Maluku Tengah 2023-2026. Acuan peraturan diatas kemudian diterjemahkan kedalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Maluku Tengah Nomor 23 Tahun 2022. Dalam Renstra tersebut memuat penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023-2026

Berdasarkan Peraturan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 480/23/SK/X/2022 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023-2026, dokumen Renstra merupakan pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian selama 5 (lima) tahun ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam melaksanakan Pembangunan Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan kepala dinas No. 480/23/SK/X/2022 Tahun 2022 tentang rencana strategis Dinkominfo ditetapkan tujuan dan sasaran beserta target kinerja sebagai berikut;

Tabel 2.1.
Tujuan, sasaran, indikator Tujuan dan sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022-2023

TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	IKU	TARGET JANGKA MENENGAH					KETERANGAN	
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
Tujuan 1 :										
Meningkatnya Sistik Jaringan Informasi, Komunikasi, dan Layanan Publik yang terintegrasi	Cakupan Infrastruktur dan Layanan Publik yang terintegrasi	%	√	26,29	58,00%	67,00%	75,00%	84,00%	Meningkat	
Sasaran 1.1										
Meningkatnya Penyelenggaraan Informasi dan komunikasi Publik serta Persandian Keamanan Informasi dan Komunikasi Daerah	1	Persentase tersedianya Pemenuhan Jaringan Daerah	%	√	15.47	22.86	48.57	74.29	100	Meningkat
	2	Capaian Predikat Indeks SPBE	%	√	0	1.54	2.31	3.08	3.85	Meningkat
	3	Presentase Keterbukaan Informasi Publik	%	√	25	25	25	25	25	Sama
	4	Persentasi Desa Terakses Jaringan Telekomunikasi	%	√	75	85	87	90	95	Meningkat
	5	Indekx Keamanan Komunikasi dan Informasi	%	√	22,93	100	100	100	100	Sama
Tujuan 2 :										
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, efektif, inovatif dan Transparan	1	Predikat SAKIP	Nilai	A	B	BB	BB	A	Sama	
				83.45	(70)	(72.)	(73)	(76)	Meningkat	
Sasaran 2.1										
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaran Tindak lanjut Nilai SAKIP			100	100	100	100	100	Sama	

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah periode tahun 2022-2026 yang memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat. Selain itu, Renstra juga harus bisa menjawab tantangan dan permasalahan strategis terkait perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kendala geografis dan demografis yang menyebabkan pembangunan infrastruktur dan akses masyarakat terhadap informasi agar kebijakan yang diambil dapat diaplikasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Dalam Perjanjian Kinerja berisi pernyataan kesepakatan kinerja yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023, secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Tujuan, sasaran, indikator Tujuan dan sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	5	6
Tujuan 1 :			
Meningkatnya Sistem Jaringan Informasi, Komunikasi, dan Layanan Publik yang terintegrasi	Cakupan Infrastruktur dan Layanan Publik yang terintegrasi	%	58,00%
Sasaran 1.1			
Meningkatnya Penyelenggaraan Informasi dan komunikasi Publik serta Persandian Keamanan Informasi dan Komunikasi Daerah	1 Persentase tersedianya Pemenuhan Jaringan Daerah	%	22.86
	2 Capaian Predikat Indeks SPBE	%	1.54
	3 Presentase Keterbukaan Informasi Publik	%	25
	4 Persentasi Desa Terakses Jaringan Telekomunikasi	%	85
	5 Indeks Keamanan Komunikasi dan Informasi	%	100
Tujuan 2 :			
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, efektif, inovatif dan Transparan	1 Predikat LAKIP	NILAI	B
			70.00
Sasaran 2.1			
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaran Tindak lanjut Nilai SAKIP	100	100

Kinerja Lainnya

Pada bagian ini dijelaskan mengenai capaian kinerja yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, namun tidak dimasukkan ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, antara lain

Tabel 2.3.
Indikator Kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2023

Kode	Indikator	Target kinerja Tahun 2023
3.1.1	Cakupan Infrastruktur dan Layanan Publik yang Terintegrasi	58,00 %

Perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 diimplementasikan melalui program dan kegiatan yang merupakan program dan kegiatan prioritas bagi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Rencana Strategis 2023-2026

No	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	Indikator	
Visi	Semakin Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan		
Agenda (4)	Meningkatkan Pemenuhan Pelayanan Dasar Secara Merata dan Peningkatan Infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah dalam mendukung aktivitas perekonomian;		
Tujuan	Meningkatnya Sistem Jaringan Informasi, Komunikasi, dan Layanan Publik yang Terintegrasi	Cakupan Infrastruktur dan Layanan Publik yang Terintegrasi	
Sasaran	Meningkatnya Penyelenggaraan Informasi dan komunikasi Publik serta Persandian Keamanan Informasi dan Komunikasi Daerah	1	Persentase tersedianya Pemenuhan Jaringan Daerah
		2	Capaian Predikat Indeks SPBE
		3	Persentase Keterbukaan Informasi Publik
		4	Persentase Desa Terakses Jaringan Telekomunikasi
		5	Indeks Keamanan Komunikasi dan Informasi

Program	I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub. Kegiatan	a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan evaluasi
Kegiatan	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub. Kegiatan	a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Kesejahtraannya terpenuhi
	b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kegiatan	3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen/laporan barang milik daerah
Sub. Kegiatan	a.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kegiatan	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub. Kegiatan	a.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Kegiatan	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub. Kegiatan	a.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
	c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
	b.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
	d.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintas Daerah
Sub. Kegiatan	a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Kegiatan	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub. Kegiatan	a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
	b.	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
	c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Program	II	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Presentase Publikasi Informasi Melalui Media Online
Kegiatan	1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub. Kegiatan	a.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
	b.	Pengelolaan media komunikasi public	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Pengelolaan media komunikasi public
	c.	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil Pelayanan informasi publik
	d.	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan hubungan media

Program	III	Program Aplikasi Informatika	Presentase E-Government yang terintegrasi
Kegiatan	1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub. Kegiatan	a.	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
	b.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	c.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Kegiatan	2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten
Sub. Kegiatan	a.	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program	IV	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Cakupan Keamanan Bidang Persandian
Kegiatan	1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Layanan Persandian dan Pengamanan Informasi
Sub. Kegiatan	a.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dalam dokumen LKjIP, capaian kinerja yang diukur adalah target kinerja yang diperjanjikan dalam penetapan IKU. Merujuk pada Renstra Dinas Kominfo Tahun 2023-2026 dan Renja Dinas Kominfo Tahun 2023, maka telah ditetapkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kominfo pada tahun 2023 dengan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5
Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	Ket
1	Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Informasi dan komunikasi Publik serta Persandian Keamanan Informasi dan Komunikasi Daerah	Persentase tersedianya Pemenuhan Jaringan Daerah	22.86	Program Aplikasi Informatika	1,562,535,000	IKU
		Capaian Predikat Indeks SPBE	1.54	Program Aplikasi Informatika		
		Persentase Desa Terakses Jaringan Telekomunikasi	85.00	Program Aplikasi Informatika		
		Presentase Keterbukaan Informasi Publik	25.00	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	173,608,500	
		Indekx Keamanan Komunikasi dan Informasi	100	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	39,055,000	
		Jumlah anggaran program mendukung Sasaran Strategis IKU			1,775,198,500	
2	Sasaran 2 :Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B (70)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,169,699,113	Non IKU
		Jumlah anggaran program mendukung Sasaran Strategis Non IKU			4,169,699,113	
Total Pagu Anggaran					5,944,897,613	

BAB III

AKUNTABELITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian visi misi dalam kurun waktu tertentu. Akuntabilitas kinerja dapat diukur melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang saling berkaitan satu sama lainnya, dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.

Capaian kinerja akan memberikan jawaban terhadap keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah dalam melaksanakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika dalam mendukung Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Untuk mendukung pembangunan di bidang komunikasi dan informatika tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis. Capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis DISKOMINFO digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Real	% Real	Capaian Tahun Sebelumnya	Analisis dan Evaluasi
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	Tujuan 1 : Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Komunikasi, Informasi, dan Persandian	Cakupan Infrastruktur dan Layanan Publik yang terintegrasi	%	58.00	50.00	74.59	96,15	Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 58,00% dan Realisasinya mencapai 25,09% atau sebesar 43,26% dengan implementasi CUKUP dan perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
2	Sasaran 1 : Meningkatnya kapabilitas bidang Komunikasi, Informasi Persandian dan Pelayanan Publik	Persentase tersedianya Pemenuhan Jaringan Daerah	%	22.86	22.86	100.00	98.25	Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 22,86% dan Realisasinya mencapai 17,14% atau sebesar 74,98 % dengan Interpretasi BAIK
		Capaian Predikat Indeks SPBE	%	1.54	1.15	74.68	0	Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 1.54% dan Realisasinya mencapai 1.15% atau sebesar 74.68% dengan Interpretasi KURANG
		Persentase Desa Terakses Jaringan Telekomunikasi	%	85.00	86.98	102.33	78.46	Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 85,00% dan Realisasinya mencapai 61,54% atau sebesar 72,40% dengan Interpretasi BAIK
		Persentase Keterbukaan Informasi Publik	%	25.00	25.00	100.00	100	Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 25,00% dan Realisasinya mencapai 20,34,00% atau sebesar 81,36 % dengan Interpretasi MEMUASKAN
		Indeks Keamanan Komunikasi dan Informasi		100	88.89	88.89	97.99	Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100% dan Realisasinya mencapai 88,89% atau sebesar 88,89% dengan Interpretasi SANGAT BAIK,
3	Tujuan 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Predikat SAKIP	Nilai	B (70)	B (70)	100	82.32	Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2023 ditargetkan sebesar A dan Realisasinya mencapai BB atau sebesar 89,41% dengan Interpretasi SANGAT BAIK
4	Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100% dan Realisasinya mencapai 100% atau sebesar 100% dengan Interpretasi MEMUASKAN

Penjelasan atas Metode perhitungan atas pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis secara rinci sebagai berikut:

Pencapaian Tujuan 1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Komunikasi, Informasi, dan Persandian dengan indikator ukuran keberhasilan yaitu **Cakupan Infrastruktur dan Layanan Publik yang Terintegrasi**. Alat ukur keberhasilan ini merupakan wujud dari pencapaian indikator sasaran antara lain;

1. Persentase tersedianya Pemenuhan Jaringan Daerah.
2. Capaian Predikat Index SPBE
3. Persentasi Desa Terakses Jaringan Telekomunikasi
4. Presentase Keterbukaan Informasi Publik
5. Indeks Keamanan Komunikasi dan Informasi

Pencapaian Tujuan 2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan ukuran keberhasilan Nilai Predikat SAKIP* dengan salah satu ukuran keberhasilan dari sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti

Rumusan Perhitungan Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran digunakan adalah sebagai berikut;

Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja	Bobot Kinerja
1		2	3
Tujuan	Meningkatnya Sistik Jaringan Informasi, Komunikasi, dan Layanan Publik yang Terintegrasi	Cakupan Infrastruktur dan Layanan Publik yang Terintegrasi	100
Sasaran	Meningkatnya Penyelenggaraan Informasi dan komunikasi Publik serta Persandian Keamanan Informasi dan Komunikasi Daerah	Persentase tersedianya Pemenuhan Jaringan Daerah	20
		Capaian Predikat Indeks SPBE	20
		Persentasi Desa Terakses Jaringan Telekomunikasi	20
		Presentase Keterbukaan informasi publik	20
		Indekx Keamanan Komunikasi dan Informasi	20
Tujuan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Predikat SAKIP*	B (70)
Sasaran	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	100,00

Capaian Kinerja Tujuan 2. **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih** dengan indikator kinerja Predikat SAKIP* (B). Dengan sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika, adapun indikator kinerja beserta target kinerja tahun 2023 adalah Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti (100%)

Realisasi atas capaian kinerja Tujuan 2 diperkirakan predikat SAKIP Diskominfo bernilai “B” dengan capaian kinerja sasaran (100%)

Selain target kinerja Rencana Strategis DISKOMINFO terdapat Rencana kinerja urusan bidang komunikasi dan informatika sebagai penjabaran dari target kinerja Agenda dan Tujuan Kepala daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2022-2026 yang dijabarkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.1.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Cakupan Infrastruktur dan Layanan Publik yang terintegrasi

No	Aspek/Fokue/ Bidang Urusan/Indikat or Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target dan Realisasi									
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
			Targ et	Realisasi	Targe t	Realisas i	Targ et	Realisas i	Target	Realisas i	Targ et	Realisa si
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Cakupan Infrastruktur dan Layanan Publik yang terintegrasi	%	96.35	95.45	58.00	50,00	67.00	--	75.00	--	84.00	--

Diskominfo dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dalam pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah yang termuat dalam agenda dan Tujuan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2022-2023 indikator pembangunan daerah adalah ; Cakupan Infrastruktur dan Layanan Publik yang Terintegrasi; capaian atas indikator sebesar 86,21% dengan realisasi sebesar 50,00% dari target 58,00%.

Berdasarkan tabel 3.1 belum tercapainya target kinerja indicator pembangunan daerah disebabkan adanya kendala dan permasalahan sebagai berikut :

Kendala :

1. Akses sarana prasarana ke kewilayah pemukiman masyarakat yang berada di daerah Blank Spot di beberapa Kecamatan tertentu Kabupaten Maluku Tengah kurang menunjang dalam rangka pembangunan BTS.
2. Akses sarana prasarana kewilayah pemukiman masyarakat di daerah pengunungan yang berada di Kecamatan Seram Utara dan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi sangat sulit dijangkau dalam rangka pembangunan BTS karena menimbulkan biaya tinggi dan hanya dapat dijangkau dengan mobilisasi material dengan menyewa Helikopter
3. Wilayah pemukiman masyarakat suku pedalaman di daerah pengunungan kebanyakan mendiami hutan lindung yang memerlukan perizinan yang rumit melalui Kementerian Kehutanan.

Permasalahan :

1. Keterbatasan personil yang mampu melaksanakan survei pada titik lokasi untuk menentukan titik koordinat dan dalam rangka melakukan koordinasi dengan masyarakat adat untuk menghibahkan lahan sesuai dengan titik koordinat.
2. Akses PLN sampai dengan saat ini belum dapat melayani masyarakat suku pedalaman di daerah pegunungan.
3. Masih terbatasnya ketersediaan regulasi daerah di bidang komunikasi dan informatika dan Persandian.

Dalam mengatasi kendala dan permasalahan tersebut maka rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika akan melaksanakan kegiatan survey titik lokasi BTS pada wilayah-wilayah Blank Spot yang masih tersisa di beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Data tersebut akan diverifikasi dan diteruskan ke BLU BAKTI melalui aplikasi PASTI yang tersedia di BLU BAKTI.
2. Dalam rangka penyelesaian permasalahan pemukiman yang masih berada dalam wilayah hutan lindung pengunungan, maka diperlukan komunikasi yang intens antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan masyarakat adat dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika kemudian dengan BAKTI dan Kementrian Kehutanan untuk dapat memberikan solusi terkait dengan perizinan.
3. Menyegerakan penetapan regulasi-regulasi daerah di bidang komunikasi, informasi dan persandian.

3.2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja dan Realisasi Tahun 2023
Agenda 3 Tujuan 1 Sasaran 1

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2023		%	Kategori
				Target	Realisasi		
1	2	3	4	11	12	13	14
1	Tujuan 1 : Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Komunikasi, Informasi, dan Persandian	Cakupan Infrastruktur dan Layanan Publik yang terintegrasi	%	58.00	50.00	86.21	Sangat Baik
1.1	Sasaran 1 : Meningkatnya kapabilitas bidang Komunikasi, Informasi Persandian dan Pelayanan Publik	Persentase tersedianya Pemenuhan Jaringan Daerah	%	22.86	22.86	100.00	Memuaskan
		Capaian Predikat Index SPBE	%	1.54	1.15	74.68	Kurang
		Persentase Desa Terakses Jaringan Telekomunikasi	%	85.00	86.98	102.33	Sangat Memuaskan
		Persentase Keterbukaan Informasi publik		25.00	25.00	100.00	Memuaskan
		Indekx Keamanan Komunikasi dan Informasi		100	88.89	88.89	Sangat Baik
2	Tujuan 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Predikat LAKIP	Nilai	B (70)	B (70)	100	Memuaskan
2.1	Sasaran 2 :Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti	%	100,00	100,00	100,00	Memuaskan

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas maka dapat diketahui bahwa pencapaian sasaran Dinas Kominfo sampai dengan Tahun 2023 masih jauh dari apa yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan perlu adanya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan publik Dinas Kominfo di tahun 2024. Perlu ada komitmen kuat dari segenap jajaran pimpinan maupun staf pelaksana yang ada di Dinas Kominfo untuk dapat melakukan perbaikan kinerja secara sistematis dan masif.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi Dinas Kominfo telah melakukan analisa terhadap permasalahan yang menyebabkan kegagalan pencapaian kinerja sebagaimana target kinerja yang telah ditetapkan.

Berikut ini merupakan beberapa permasalahan yang dihadapi selama tahun 2023.

1. Adanya penyesuaian alokasi anggaran dan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan (perubahan) yang harus difokuskan pada penggunaan alokasi anggaran kegiatan dalam rangka penanganan dampak Inflasi. Hal menyebabkan terjadinya perubahan sangat

signifikan terhadap komposisi anggaran yang menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kominfo.

2. Belum terintegrasinya database dan layanan e-government perangkat daerah di Kabupaten Maluku Tengah. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya jaringan internet pada beberapa perangkat daerah yang terkoneksi ke pusat data (server) Dinas Kominfo dan kurangnya anggaran yang mendukung penyediaan jaringan intra pemda.
3. Implementasi e-government/SPBE di Kabupaten Maluku Tengah belum dilaksanakan. Hal ini menyebabkan Indeks SPBE Kabupaten Maluku Tengah memperoleh realisasi kurang.
4. Belum optimalnya pelayanan komunikasi dan informatika. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman tupoksi dan Penempatan PNS dalam jabatan tidak sesuai kompetensi dan tidak berdasarkan prinsip *the right man in the right place and the right man in the right job*.
5. Masih terbatasnya akses masyarakat di beberapa wilayah terhadap informasi dan komunikasi. Permasalahan kesenjangan digital di wilayah Kabupaten Maluku Tengah banyak dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi. Luas wilayah dan kondisi geografis Kabupaten Maluku Tengah yang berbentuk kepulauan dan pegunungan, penyebaran penduduk yang tidak merata, serta penggunaan satelit yang kurang optimal juga menyebabkan jangkauan komunikasi dan penyebaran informasi menjadi tidak merata.
6. Data statistik sektoral yang ada belum memiliki rekomendasi BPS. Hal ini disebabkan oleh belum adanya kerjasama tertulis (MoU) antara Dinas Kominfo dengan BPS.
7. SDM kurang berkompeten di bidang pengelolaan data statistik sektoral. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan di bidang statistik sektoral.
8. Tidak ada peralatan persandian yang dibutuhkan mendukung pengamanan data/ informasi pemda. Hal ini disebabkan kurangnya penyediaan anggaran di Dinas Kominfo.
9. Prosedur dan mekanisme penyelenggaraan persandian untuk pengamanan data/ informasi pemda tidak jelas. Hal ini disebabkan belum adanya regulasi daerah (Perda/Perbup) terkait penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Beberapa solusi sebagai upaya alternatif yang akan dilakukan oleh Dinas Kominfo dalam mengendalikan permasalahan yang dihadapi selama tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur komunikasi dan informatika (jaringan internet) melalui penyediaan jaringan serat optic (FO) pada perangkat daerah untuk mengatasi kendala tidak terintegrasinya sistem database aplikasi perangkat daerah. Oleh karena itu, perlu terus dikembangkan di berbagai aspek yang mendorong tercapainya efektifitas dan efisiensi kinerja dan pelayanan publik yang mencakup antara lain : infrastruktur, aplikasi, kelembagaan dan kebijakan pada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Maluku Tengah. Pengembangan infrastruktur TIK terutama jaringan FO sehingga dapat diwujudkan kecepatan pelayanan jaringan, sehingga kinerja seluruh perangkat daerah dan fungsi pelayanan publik dapat maksimal;
2. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur telekomunikasi melalui penyediaan alat penguat sinyal (repeater) pada wilayah yang belum terlayani jaringan telekomunikasi (blankspot area). Selain itu, intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meyakinkan dan melatih masyarakat bahwa penggunaan TIK mampu meningkatkan produktivitas, lapangan kerja, dan ketersediaan informasi yang cepat serta mudah digunakan di berbagai aspek bidang kehidupan.
3. Untuk meningkatkan SDM aparatur yang profesional dan proporsional, Dinas Kominfo akan lebih intensif melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Maluku Tengah. Selain itu, Dinas Kominfo akan berupaya mengikutsertakan ASN yang dimiliki untuk mengikuti dalam pelatihan TIK, statistik dan persandian.
4. Peningkatan kerjasama di bidang statistik dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maluku Tengah.
5. Koordinasi dengan Bagian Hukum Setda terkait Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Persandian di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
6. Dalam pengelolaan keamanan data dan informasi pemerintah daerah, perlu menggunakan metode enkripsi yang dikembangkan sendiri pada semua aplikasi dan peralatan jaringan komputer.
7. Dalam pengelolaan aspirasi dan pengaduan pelayanan publik, masyarakat dapat dimudahkan menyampaikan keluhannya melalui aplikasi e-LAPOR sehingga untuk masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari pusat kota dapat menghemat biaya dalam penyampaian aspirasi dan pengaduan, sekaligus langsung didistribusikan kepada perangkat daerah terkait agar segera ditindaklanjuti.

3.2. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

A. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Kominfo telah melakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi Penggunaan Sumber daya Dinas Kominfo Tahun 2022 meliputi:

1. Efisiensi Anggaran.

Efisiensi penggunaan anggaran Dinas Kominfo dalam rangka mencapai sasaran kinerja sesuai dengan target Renja Tahun 2023 terlihat dari Realisasi Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.5.607.553.323,- atau 94,33% dari Pagu DPA sebesar Rp. 5.944.897.613,- Dengan rincian Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar 2.579.322.696,- atau 95,80% dari pagu Rp. 2.686.309.113,- , Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp.2.965.971.627,- atau 97,36% dari pagu anggaran Rp.3.046.329.500,-. dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.62.259.000 atau 29.33 dari pagu sebesar Rp.212.259.000,-

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut;

KODE	URAIAN BELANJA	2023			2022
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
5.1	BELANJA OPERASIONAL	5,732,638,613	5,539,489,527	96.63	4,968,489,829
5.1.01	Belanja Pegawai	2,686,309,113	2,573,517,900	95.80	2,343,898,643
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3,046,329,500	2,965,971,627	97.36	2,624,591,186
5.2.	Belanja Modal	212,259,000	62,259,000	29.33	532,294,400
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	212,259,000	62,259,000	29.33	532,294,400
		5,944,897,613	5,601,748,527	94.23	5,500,784,229

Realisasi Anggaran Berdasarkan Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2022.

Realisasi anggaran Belanja Langsung Dinas Kominfo berdasarkan program dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023

Kode	Urusan Bidang, Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan / Sub Kegiatan (<i>output</i>)	TARGET		PAGU ANGGARAN	TOTAL REALISASI		%		KET
			VOL	SATUAN		VOL	Rp.	KEU	FISIK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16	Dinas Komunikasi dan Informatika			%	5,944,897,613		5,607,553,323	94.33	100	%
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	4,169,699,113		3,897,384,992	93.47	100	Sangat Memuaskan
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Dokumen	19,255,000	2	18,895,000	98.13	100	Sangat Memuaskan
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan evaluasi	2	Dokumen	19,255,000	2	18,895,000	98.13	100	Sangat Memuaskan
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	Laporan	3,196,549,113	2	3,082,122,696	96.42	100	Sangat Memuaskan
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Kesejahteraannya terpenuhi	29	Orang	2,636,749,113	29	2,529,762,696	95.94	100	Sangat Memuaskan
2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Laporan	559,800,000	1	552,360,000	98.67	100	Sangat Memuaskan
2.16.01.2.03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen/laporan barang milik daerah	1	Laporan	41,220,000	1	41,220,000	100	100	Sangat Memuaskan
2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	41,220,000	1	41,220,000	100	100	Sangat Memuaskan
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Dokumen	10,000,000	1	9,980,000	100	100	Sangat Memuaskan
2.16.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	10,000,000	1	9,980,000	100	100	Sangat Memuaskan
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	Laporan	677,702,000	5	527,246,197	77.80	84.00	Memuaskan
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	Paket	187,500,000	2	37,500,000	20.00	20.00	Kurang Memuaskan
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	84,672,000	1	84,539,500	99.84	100	Sangat Memuaskan
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	4,725,000	1	4,724,650	99.99	100	Sangat Memuaskan
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5	Dokumen	53,885,000	5	53,595,000	99.46	100	Sangat Memuaskan

Kode	Urusan Bidang, Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	TARGET		PAGU ANGGARAN	TOTAL REALISASI		%		KET
			VOL	SATUAN		VOL	Rp.	KEU	FISIK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	346,920,000	1	346,887,047	99.99	100	Sangat Memuaskan
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	Laporan	122,669,000	3	116,578,999	95.04	100.00	Sangat Memuaskan
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	4,000,000	1	3,055,000	76.38	100	Memuaskan
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	72,500,000	1	67,354,999	92.90	100	Sangat Memuaskan
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	46,169,000	1	46,169,000	100.00	100	Sangat Memuaskan
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6	Unit	102,304,000	6	101,342,100	99.06	100	Sangat Memuaskan
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	45,204,000	1	44,242,100	97.87	100	Sangat Memuaskan
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	Peralatan	7,100,000	4	7,100,000	100.00	100	Sangat Memuaskan
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	50,000,000	1	50,000,000	100.00	100	Sangat Memuaskan
2.16.02.2.	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Presentase Publikasi Informasi Melalui Media Online	25.00	%	173,608,500	25.00	141,251,000	81.36	81.36	Memuaskan
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4	Laporan	173,608,500	4	141,251,000	81.36	81.36	Cukup Memuaskan
2.16.02.2.01.004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1	Dokumen	21,366,500	1	9,358,000	43.80	50.00	Cukup
2.16.02.2.01.005	Pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Pengelolaan media komunikasi public	1	dokumen	50,000,000	1	50,000,000	100.00	100	Sangat Memuaskan
2.16.02.2.01.006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil Pelayanan informasi public	1	dokumen	52,249,000	1	52,079,000	100.00	100	Sangat Memuaskan
2.16.02.2.01.007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan hubungan media	1	Layanan	49,993,000	1	29,814,000	59.64	75.45	Sangat Memuaskan

Kode	Urusan Bidang, Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	TARGET		PAGU ANGGARAN	TOTAL REALISASI		%		KET
			VOL	SATUAN		VOL	Rp.	KEU	FISIK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.03.2	Program Aplikasi Informatika	Presentase E-Government yang terintegrasi	55.83	%	1,562,535,000	53.71	1,530,405,331	97.94	100.00	Sangat Memuaskan
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2	Laporan	1,464,873,500	2	1,433,380,831	97.85	100.00	Sangat Memuaskan
2.16.03.2.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	7	Domain	70,000,000	7	70,000,000	100	100.00	Sangat Memuaskan
2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	224,378,500	1	222,155,650	99.01	100.00	Sangat Memuaskan
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1	Sistem	1,170,495,000	1	1,141,225,181	97.50	100.00	Sangat Memuaskan
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten	1	Laporan	97,661,500	1	97,024,500	99.35	100.00	Sangat Memuaskan
2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	97,661,500	1	97,024,500	99.35	100.00	Sangat Memuaskan
2.21.02.2	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Cakupan Keamanan Bidang Persandian	100	%	39,055,000	88.89	38,512,000	98.61	100.00	Sangat Memuaskan
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Layanan Persandian dan Pengamanan Informasi	1	Laporan	39,055,000	1	38,512,000	98.61	100.00	Sangat Memuaskan
2.21.02.2.01.004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	8	PD	39,055,000	8.00	38,512,000	98.61	100.00	Sangat Memuaskan

Sesuai rencana kerja program dan kegiatan yang tertuang dalam DPA Dinas Kominfo Tahun Anggaran 2023, Dinas Kominfo sedianya akan melaksanakan 4 program, 11 kegiatan dan 25 sub kegiatan.

2. Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana.

Efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana untuk penyebarluasan/diseminasi informasi pemerintah daerah Dinas Kominfo lebih memanfaatkan media online untuk lebih mengefektifkan penyampaian informasi pemerintah daerah kepada masyarakat.

3. Efisiensi Sumber Daya Manusia Dinas Kominfo melakukan memberdayakan tenaga ASN 29 orang dan tenaga honorer sebanyak 21 orang yang dinilai bekerja efektif. Hal ini juga dilakukan untuk lebih mengefektifkan kinerja seluruh pegawai serta optimalisasi pemanfaatan sarana TIK dalam pelaksanaan kegiatan.

B. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Dinas Kominfo telah melakukan analisa terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja sebagaimana target kinerja yang telah ditetapkan.

Berikut ini merupakan analisis terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja selama tahun 2023 antara lain :

1. Fasilitasi pelaksanaan telekonferensi/rapat-rapat pemerintah daerah yang diselenggarakan secara online melalui video conference (vidcon). Hal ini dilakukan bertujuan untuk mencegah penularan dan penyebaran penyakit Corona (Covid19). Adanya dukungan dari perangkat daerah (PD) yang menangani sendiri peralatan jaringan lingkup internal perangkat daerah sehingga pengelola jaringan kabupaten bisa fokus menangani jaringan utama (backbound) antar perangkat daerah, serta dukungan dari perangkat daerah yang berusaha mengamankan sendiri setiap perangkat yang digunakan terutama data dan aplikasi dengan tingkat security level menengah.
2. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait Penyelenggaraan Satu Data Maluku Tengah dan Penyelenggaraan Kominfo di Kabupaten Maluku Tengah.
4. Fasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok informasi masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan.
5. Pengembangan dan pengelolaan website pemerintah daerah (maltengkab.go.id) yang bertujuan membantu penyampaian informasi kepada masyarakat, yang mendukung publikasi melalui media cetak, media sosial dan media online.
6. Diseminasi dan penyebarluasan informasi Program Pencegahan Stunting.

**Identifikasi Resiko Terhadap Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah
Tahun Anggaran 2023**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tujuan	Analisis Resiko				Keterkaitan dengan tujuan SPIP (mengacu tugas pokok dan fungsi dlm pencapaian Visi, Misi Renstra)	Penyebab		Dampak		Pengendalian Yang Harus Ada	Pengendalian Yang Sudah Ada
		NO	Uraian	Penanggung jawab	Tingkat Resiko		Uraian	Sumber	Uraian	Pihak Yg terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota												
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	terjaminnya kelancaran dan tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan dokumen evaluasi kinerja OPD	1	kurangnya Ketepatan waktu penyampaian dokumen bidang teknis, adanya kegiatan teknis yang masih kurang tepat sasaran dan tujuan kegiatan dan masih belum adanya sinkronisasi kegiatan	Sekretariat	Resiko tinggi	Meningkatkan tatakelola Pemerintahan dengan ukuran keberhasilan nilai SAKIP	Keterlambatan penyediaan dokumen perencanaan	Bidang teknis	tingkat ketersediaan dokumen tdk tepat waktu	OPD	Perubahan tatakelola	penyampaian laporan bulanan dan triwulan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Untuk memberikan rasa keadilan /kesetaraan sehingga kesejahteraan ASN dapat memenuhi kebutuhan hidup yg layak	1	tingkat kesejahteraan ASN yang berdampak terhadap kinerja	Sekretariat	Resiko sedang	Meningkatkan tatakelola Pemerintahan dengan ukuran keberhasilan nilai SAKIP	Variasi pendapatan dan tunjangan ASN	Sistem Keuangan Negara	Kinerja ASN, Motivasi kerja, loyalitas dan semangat ASN	OPD	Tatakelola keuangan dan disiplin ASN	Pemberian Reward dan Funisment terhadap ASN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Membantu Dinas dalam penyelesaian tugas teknis dan non teknis terkait dgn keterbatasan SDM	1	kualitas SDM PNS kurang menjadi perhatian	Sekretariat	Resiko Sedang	Meningkatkan tatakelola Pemerintahan dengan ukuran keberhasilan nilai SAKIP	Distribusi PNS tidak sesuai standar kompetensi sesuai bidang tugas	PEMDA	Operasional teknis dan Non teknis	OPD/PEMDA	Peningkatan SDM PNS	DIKLAT PNS dan Honorer pengelola IT
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Data Aset Barang Milik Daerah pada SKPD secara berkala		Kurangnya ketepatan waktu dalam membuat data Aset Barang Milik Daerah pada SKPD	Sekretariat	Resiko Sedang	Meningkatkan tatakelola Pemerintahan dengan ukuran keberhasilan nilai SAKIP	Data Aset Barang Milik Daerah pada SKPD tidak diUpdate secara berkala	Sekretariat dan atau bidang teknis OPD	Pengetahuan dan ketrampilan ASN	ASN dan Pemda	Rencana anggaran dan efisiensi	Optimalisasi pendataan Aset Barang Milik Daerah

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tujuan	Analisis Resiko				Keterkaitan dengan tujuan SPIP (mengacu tugas pokok dan fungsi dlm pencapaian Visi, Misi Renstra)	Penyebab		Dampak		Pengendalian Yang Harus Ada	Pengendalian Yang Sudah Ada
		N0	Uraian	Penanggung jawab	Tingkat Resiko		Uraian	Sumber	Uraian	Pihak Yg terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya Data DUK dan Bezeting secara berkala	1	Hak Kenaikan Pangkat dan Berkala ASN tidak terupdate	Sekretariat	Resiko Sedang	Meningkatkan tatakelola Pemerintahan dengan ukuran keberhasilan nilai SAKIP	Sistim Monitoring ASN yang belum terintegrasi sehingga dapat menyebabkan kebutuhan ASN yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pada OPD Dinas Koninfo	Sekretariat dan atau bidang teknis OPD	Asistensi Kepegawaian terhambat	ASN	Segera disiapkan Sistem Monitoring Kepegawaian yang berbasis Teknologi Informasi serta menyiapkan sarana dan prasarana pendukung Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai ASN yang terintegrasi	Mekanisme Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Kurangnya kenyamanan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan	Sekretariat	Resiko Sedang	Meningkatkan tatakelola Pemerintahan dengan ukuran keberhasilan nilai SAKIP	Tidak erpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan dalam menunjang aktivitas kantor	Sekretariat dan atau bidang teknis OPD	Frekuensi pekerjaan pegawai tidak optimal	ASN	Rencana Anggaran dan efisiensi	Optimalisasi Penggunaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya ATK selama 1 tahun, untuk menunjang ASN dengan ATK yang lengkap dan memberikan pelayanan administrasi perkantoran yang optimal	1	kurangnya kinerja dan Tatakelola bahan logistik kantor	Sekretariat	Resiko Sedang	Meningkatkan tatakelola Pemerintahan dengan ukuran keberhasilan nilai SAKIP	Tidak tercapainya, terpenuhinya dan atau kelebihan penyediaan bahan logistik kantor	Sekretariat dan atau bidang teknis OPD	Penyelesaian tugas-tugas kantor yang tidak optimal	OPD	Tata Kelola logistik kantor	Mekanisme permintaan logistik kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Mendukung pelaksanaan tugas penyediaan barang cetak dan penggandaan serta administrasi perkantoran lainnya	1	Terpenuhi dan atau tidak terpenuhinya barang cetak dan penggandaan	Sekretariat	Resiko Ringan	Meningkatkan tatakelola Pemerintahan dengan ukuran keberhasilan nilai SAKIP	perencanaan yang tidak optimal	OPD	Kinerja Dinas tidak optimal	OPD	Rencana kerja dan tata kelola	mekanisme permintaan sesuai kebutuhan dan ketersediaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	terpenuhinya kebutuhan informasi melalui langganan koran dan pemenuhan buku perundang undangan	1	kurangnya Pemanfaatan bahan bacaan dan peraturan Oleh ASN secara optimal	Sekretariat	Resiko Ringan	Meningkatkan tatakelola Pemerintahan dengan ukuran keberhasilan nilai SAKIP	Faktor motivasi dan kinerja setiap ASN	Orientasi ASN	Pengetahuan dan ketrampilan ASN	OPD	Tata kelola dan fasilitas ruang baca	Penyediaan surat kabar dan buku peraturan pada meja tamu/ruang absensi ASN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tujuan	Analisis Resiko				Keterkaitan dengan tujuan SPIP (mengacu tugas pokok dan fungsi dlm pencapaian Visi, Misi Renstra)	Penyebab		Dampak		Pengendalian Yang Harus Ada	Pengendalian Yang Sudah Ada
		NO	Uraian	Penanggung jawab	Tingkat Resiko		Uraian	Sumber	Uraian	Pihak Yg terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mendukung pelaksanaan tugas/pekerjaan pelayanan administrasi kantor untuk peningkatan ilmu pengetahuan dan pengalaman lainnya	1	Fluktuasi harga dan ketersediaan waktu pelaksanaan tugas sesuai standar yang ditetapkan	Sekretariat	Resiko Berat	Meningkatkan tatakelola Pemerintahan dengan ukuran keberhasilan nilai SAKIP	Kurangnya perencanaan tentang perjalanan dinas	Ketersediaan Pagu	lancarnya pelayanan administrasi OPD	OPD dan Publik	Optimalisasi rapat koordinasi dan konsultasi	Seleksi keterlibatan ASN dalam mengikuti kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pelayanan surat menyurat di OPD	1	Fluktuasi harga dan ketersediaan yang tidak memadai	Sekretariat	Resiko ringan	Meningkatkan tatakelola Pemerintahan dengan ukuran keberhasilan nilai SAKIP	Perencanaan dan estimasi penggunaan	Alokasi pagu dan rencana kerja	Pelayanan Administrasi perkantoran tidak optimal	OPD	Rencana dan Tatakelola	Optimalisasi penggunaan sarana surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik	1	Fluktuasi harga dan ketersediaan biaya	Sekretariat	Resiko tinggi	Meningkatkan tatakelola Pemerintahan dengan ukuran keberhasilan nilai SAKIP	Rencana dan estimasi anggaran tidak optimal	Alokasi pagu dan penggunaan	Pelayanan Administrasi perkantoran tidak optimal	OPD	Rencana Anggaran dan efisiensi	Penggunaan jasa sesuai kebutuhan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Untuk menyediakan jasa tenaga teknis /operasional, aplikasi dan sistem informasi layanan perkantoran dan layanan publik di OPD	1	Tingkat pengendalian tenaga teknis dan tenaga operasional IT	Sekretariat	Resiko sedang	Meningkatkan tatakelola Pemerintahan dengan ukuran keberhasilan nilai SAKIP	Ketersedian SDM pengendali pada PNS	Keterbatasan SDM PNS pada OPD	Tata kelola layanan tidak optimal	OPD dan PEMDA	SOP, Perumusan tugas teknis dan non teknis, laporan pelaksanaan tugas dan pengawasan terstruktur	Penetapan Admin pengeloa sesuai tupoksi
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya, pajak dan perizinan kendaraan serta untuk mendukung pelaksanaan tugas perkantoran	1	Fluktuasi harga, kenaikan pajak dan material kendaraan dinas	Sekretariat	Resiko sedang	Meningkatkan tatakelola Pemerintahan dengan ukuran keberhasilan nilai SAKIP	Rencana dan estimasi anggaran tidak optimal	Alokasi pagu dan penggunaan	Pelayanan Administrasi perkantoran tidak optimal	OPD dan Publik	Rencana anggaran dan efisiensi	Optimalisasi anggaran kendaraan dinas
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Fluktuasi harga Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Sekretariat	Resiko ringan	Meningkatkan tatakelola Pemerintahan dengan ukuran keberhasilan nilai SAKIP	Rencana dan estimasi anggaran tidak optimal	Internal dan eksternal	Tingkat ketersediaan perlatan yang memadai belum optimal	OPD	Rencana anggaran dan efisiensi	Optimalisasi penggunaan peraltanan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tujuan	Analisis Resiko				Keterkaitan dengan tujuan SPIP (mengacu tugas pokok dan fungsi dlm pencapaian Visi, Misi Renstra)	Penyebab		Dampak		Pengendalian Yang Harus Ada	Pengendalian Yang Sudah Ada
		NO	Uraian	Penanggung jawab	Tingkat Resiko		Uraian	Sumber	Uraian	Pihak Yg terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program Informasi Dan Komunikasi Publik												
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tersedianya Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1	Perencanaan terkait dengan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik belum maksimal terkait dengan akomodasi jumlah anggaran maupun estimasi terhadap program Pengelolaan konten yang harus disediakan oleh Dinas Kominfo	Bidang IKP	Tinggi	Tercapaiannya Tujuan Organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisiensi	Kurangnya Informasi Lintas Sektor	Internal dan eksternal	Informasi kepada masyarakat tidak maksimal	Publik	Memfasilitasi penyampaian informasi kepada masyarakat	Memfasilitasi penyampaian informasi kepada masyarakat
Pengelolaan media komunikasi public	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2	Tidak terpublikasinya Informasi Daerah	Bidang IKP	Tinggi	Tercapaiannya Tujuan Organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisiensi	Kurangnya Informasi Lintas Sektor	Internal dan eksternal	Informasi kepada masyarakat tidak maksimal	Publik	Memfasilitasi penyampaian informasi kepada masyarakat	Memfasilitasi penyampaian informasi kepada masyarakat
Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Informasi Daerah untuk Publik	3	Tidak terpublikasinya Informasi Daerah	Bidang IKP	Tinggi	Tercapaiannya Tujuan Organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisiensi	Kurangnya Informasi Lintas Sektor	Internal dan eksternal	Informasi kepada masyarakat tidak maksimal	Publik	Memfasilitasi penyampaian informasi kepada masyarakat	Memfasilitasi penyampaian informasi kepada masyarakat
Layanan Hubungan Media	Tersedianya Fasilitas dan kerjasama dengan seluruh Media Komunikasi dan Informasi	4	Tidak tersampainya Informasi Daerah	Bidang IKP	Sedang	Tercapaiannya Tujuan Organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisiensi	Kurangnya Koordinasi sektor Pers dan Peliputan	Internal dan eksternal	Informasi kepada masyarakat tidak maksimal	OPD, Pers dan Publik	Terciptanya kerjasama Pers dan Peliputan	Facilitasi kegiatan pada organisasi Pers
Program Aplikasi Informatika												
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	1	Menerbitkan mekanisme penggunaan nama domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/ Kota.	Bidang E-Government	Tinggi	Tercapaiannya tujuan renstra dan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisiensi	SDM Kurang mengerti dalam penggunaan/ mengolah Data	Internal	Data tidak tersedia, tidak diolah, dan tidak dipublikasikan secara memadai	Seluruh OPD dan Publik	Peningkatan Anggaran, peningkatan Sumber daya Manusia dan dukungan Sarana dan Prasarana	Tersedianya website OPD

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tujuan	Analisis Resiko				Keterkaitan dengan tujuan SPIP (mengacu tugas pokok dan fungsi dlm pencapaian Visi, Misi Renstra)	Penyebab		Dampak		Pengendalian Yang Harus Ada	Pengendalian Yang Sudah Ada
		NO	Uraian	Penanggung jawab	Tingkat Resiko		Uraian	Sumber	Uraian	Pihak Yg terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2	Menerbitkan mekanisme penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/ Kota.	Bidang E-Government	Tinggi	Tercapainya tujuan renstra dan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisiensi	SDM Kurang mengerti dalam penggunaan/ mengolah Data	Internal	Data tidak tersedia, tidak diolah, dan tidak dipublikasikan secara memadai	Seluruh OPD dan Publik	Peningkatan Anggaran, peningkatan Sumber daya Manusia dan dukungan Sarana dan Prasarana	Tersedianya website OPD
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya Layanan Internet untuk OPD dan Publik	3	Kesalahan pada Topologi Jaringan Internet	Bidang E-Government	Tinggi	Tercapainya Tujuan Renstra dan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisiensi	SDM kurang Profesional, Referensi Topologi kurang Tepat	Internal	Koneksi jaringan Lambat (LEMOT)	Pemerintah, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Peningkatan Kapasitas SDM	Menggunakan Referensi Topologi yang tepat
			Kerusakan pada Hardware Jaringan		Rendah	Tercapainya tujuan renstra dan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisiensi	Cuaca Ekstrem dan Tegangan Listrik yang tidak stabil					
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemerintah, Masyarakat dan stake holder lainnya dapat dengan mudah memperoleh akses informasi dan layanan Pemerintah Daerah		Menerbitkan mekanisme penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/ Kota.	Bidang E-Government	Tinggi	Tercapainya tujuan renstra dan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisiensi	Tidak adanya mekanisme pelaksanaan yang baik dan bertanggungjawab.	Eksternal	Mekanisme pelaksanaan yang tidak dapat diukur dengan baik.	Seluruh OPD dan Publik	Peningkatan Anggaran, peningkatan Sumber daya Manusia dan dukungan Sarana dan Prasarana	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tujuan	Analisis Resiko				Keterkaitan dengan tujuan SPIP (mengacu tugas pokok dan fungsi dlm pencapaian Visi, Misi Renstra)	Penyebab		Dampak		Pengendalian Yang Harus Ada	Pengendalian Yang Sudah Ada
		NO	Uraian	Penanggung jawab	Tingkat Resiko		Uraian	Sumber	Uraian	Pihak Yg terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi												
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Menjamin kerahasiaan data informasi pemerintah daerah yang diselenggarakan melalui suatu jaring komunikasi khusus yang keamanannya sesuai standar BSSN		Mengalami kegagalan karena tidak didukung oleh penganggaran yang memadai	Bidang Persandian	Sedang	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi, informasi, persandian daerah dan kualitas pelayanan publik	Belum adanya regulasi terkait JKS, kompetensi SDM serta pengadaan perangkat yang belum memadai	Pemerintah Daerah, dan OPD	keamanan informasi pemerintah daerah rentan terhadap serangan siber	pimpinan daerah, perangkat daerah, internal perangkat daerah	Aplikasi yang digunakan serta operator harus tersertifikasi	BSSN

BAB 4

PENUTUP

Berdasarkan Hasil Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah Pada Tahun 2023 sebagaimana dijelaskan diatas diharapkan dapat menggambarkan pencapaian tujuan dan sasaran dinas dalam “Mewujudkan Maluku Tengah Semakin Maju, Sejahtera Dan Berkelanjutan”

Berbagai kendala dan masalah yang dihadapi menjadi tolak ukur dalam pengambilan kebijakan untuk tahun mendatang.

Masohi, Pebruari 2024

Kepala Dinas,



Drs. HENKRY TOMASOA, MA

NIP. 19601028 198902 1 002